

Efisiensi Pengelolaan Perekonomian Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Provinsi



Ivantia S. Mokoginta dan Miryam L. Wijaya
Center for Economic Studies, Universitas Katolik Parahyangan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengelolaan daerah setelah lebih dari 10 tahun kebijakan desentralisasi dan pemekaran daerah dijalankan. Dengan menggunakan teknik DEA, penelitian ini menyimpulkan, bahwa dari 27 provinsi yang diteliti pada tahun 2010 - 2011, belum semua provinsi beroperasi pada tingkat optimal. Terdapat 13 provinsi atau sekitar 48% yang beroperasi pada kondisi inefisien. Sebanyak 11 provinsi atau 85% dari 13 provinsi di atas adalah provinsi-provinsi yang telah lama terbentuk sebelum kebijakan desentralisasi dan pemekaran daerah dijalankan. Hal ini terjadi, karena adanya pemanfaatan tenaga kerja, modal dan peran pemerintah yang belum optimal. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya tingkat skala efisiensi teknis yang beragam, sehingga kebijakan pengembangan daerah provinsi perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut..

Methods

Sebelum dianalisis, provinsi-provinsi tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kelompok (A, B, C, D). Pengelompokkan ini bertujuan untuk menyatukan beberapa provinsi-provinsi berdasarkan karakteristik sejenis. Karakteristik yang dipilih untuk pengelompokkan adalah: kemampuan kelembagaan ekonomi daerah, pendapatan per kapita dan potensi ekonomi daerah. Hal ini perlu dilakukan, karena DEA menggunakan prinsip efisiensi relative, di mana masing-masing kelompok akan memiliki satu provinsi referens yang digunakan sebagai *benchmark* bagi provinsi lain dalam kelompoknya. Prinsip relative efisien baru bermakna bila provinsi-provinsi dibandingkan dengan provinsi referens dengan karakteristik yang sama. Analisis DEA untuk provinsi dalam masing-masing kelompok didasarkan pada PDRB sebagai output dan tenaga kerja, modal dan peran pemerintah sebagai input.

Hasil

Hasil pengelompokkan daerah adalah sebagai berikut:

Kelompok A:

No	Provinsi	Skala Ekonomi	SLACKS (%)*			PERAN**		
			Tenaga Kerja	Modal	Peran Pemerintah	Tenaga Kerja	Modal	Peran Pemerintah
1	Sulawesi Selatan	CRS	0	0	0	√		x
2	Maluku	DRS	0	0	0		√	x
3	Sulawesi Tengah	IRS	0	24.15	76.67		√	x
4	Maluku Utara	IRS	0	0	45.40		√	x

Kelompok B:

No	Provinsi	Skala Ekonomi	SLACKS (%)*			PERAN**		
			Tenaga Kerja	Modal	Peran Pemerintah	Tenaga Kerja	Modal	Peran Pemerintah
1	Jawa Barat	CRS	0	0	0		x	√
2	Jawa Timur	DRS	0	0.78	0		x	√
3	Banten	DRS	0	0	0		x	√
4	Riau	IRS	0	0	0			√
5	Sumatra Utara	IRS	0	32.33	96.31	√	x	x
6	Sumatra Barat	IRS	0	10.78	84.20	√	x	x
7	Kep. Bangka Belitung	IRS	0	0	46.30	√		x
8	Bali	IRS	0	0	93.49	√		x
9	Sulawesi Utara	IRS	0	34.82	96.97	√	x	x

Catatan: *slacks input/input aktual dikali 100%; **tanda √ menunjukkan peran variabel terbesar dalam proses produksi; tanda x menunjukkan tidak ada peran.

Hasil

Kelompok C:

No	Provinsi	Skala Ekonomi	SLACKS (%)*			PERAN**		
			Tenaga Kerja	Modal	Peran Pemerintah	Tenaga Kerja	Modal	Peran Pemerintah
1	Sumatra Selatan	CRS	0	0	0			√
2	Jambi	DRS	0	0	0	√		
3	Bengkulu	DRS	0	0	0			√
4	Jawa Tengah	DRS	0	0	0			√
5	Nusa Tenggara Timur	DRS	30.52	0	0	x		√
6	Kalimantan Selatan	DRS	0	0	0			√
7	Lampung	IRS	0	0	0			√
8	DI Yogyakarta	IRS	0	0	38.16	√		x
9	Nusa Tenggara Barat	IRS	0	0	60.63	√		x
10	Kalimantan Barat	IRS	0	0	27.70			x
11	Sulawesi Tenggara	IRS	0	0	73.93	√		x
12	Papua	IRS	0	31.18	84.25	√	x	x

Catatan: *slacks input/input aktual dikali 100%; **tanda √ menunjukkan peran variabel terbesar dalam proses produksi; tanda x menunjukkan tidak ada peran.

Kelompok D:

No	Provinsi	Skala Ekonomi	SLACKS (%)*			PERAN**		
			Tenaga Kerja	Modal	Peran Pemerintah	Tenaga Kerja	Modal	Peran Pemerintah
1	Sulawesi Barat	DRS	0	0	0	√		x
2	Papua Barat	CRS	0	0	0	√		x

Catatan: *slacks input/input aktual dikali 100%; **tanda √ menunjukkan peran variabel terbesar dalam proses produksi; tanda x menunjukkan tidak ada peran.

Nama provinsi yang dicetak biru adalah provinsi referens dalam masing-masing kelompok. Provinsi referens tersebut beroperasi pada tingkat efisiensi teknis *Constant Returns to Scale*. Berdasarkan prinsip relative efficiency, terlihat bahwa di beberapa provinsi terjadi pemborosan (*slacks*) input, baik itu berupa tenaga kerja, modal maupun peran pemerintah. Adanya pemborosan tersebut mengindikasikan, bahwa provinsi-provinsi tersebut dapat mengurangi penggunaan input di atas tanpa memengaruhi jumlah output yang telah dihasilkan.

Kesimpulan

Tingkat efisiensi daerah provinsi setelah kebijakan desentralisasi dan pemekaran daerah berjalan masih beragam. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari 27 provinsi yang dianalisis, terdapat 13 provinsi atau sekitar 48% yang beroperasi pada kondisi inefisien. Provinsi-provinsi tersebut adalah Maluku Utara, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bali, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Papua. Sebanyak 11 provinsi atau 85% dari 13 provinsi di atas adalah provinsi-provinsi yang telah lama terbentuk sebelum kebijakan desentralisasi dan pemekaran daerah dijalankan. Sementara dua provinsi lainnya, yaitu Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi baru hasil pemekaran.

Bibliography

- Badan Pusat Statistik. (2008, October). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013a). *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2011 - 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013b). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia* (November ed.). Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.